

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan teknologi pada pemerintahan khususnya kelurahan atau desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan desa terhadap masyarakat sehingga mengurangi pemikiran terhadap ketertinggalan desa yang biasa disebut dengan *smart village* (Rachmawati, 2018). Berkaitan dengan terbitnya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang melahirkan kebijakan tentang dana Desa dan mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada inovasi Desa Pintar (*smart village*) (Subekti and Damayanti, 2019).

Smart village merupakan suatu konsep desa pintar dengan maksud desa yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi seperti *smart government*, *smart community* dan *smart environment* (Herdiana, 2019). Penerapan *smart village* saat ini masih belum banyak diterapkan seperti kelurahan Candimas Kecamatan Natar yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan dan memiliki jumlah penduduk 10470 Jiwa dengan 116 Kepala Keluarga. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut tentunya pihak desa perlu meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagai bentuk inovasi berupa desa pintar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Proses pengolahan data pada kelurahan tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu proses pencatatan data kependudukan, pencatatan data usaha desa, penyampaian informasi mengenai kegiatan desa, secara keseluruhan pengolahan tersebut dilakukan dengan media tertulis maupun media teknologi *office* (Subekti and Damayanti, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak kelurahan diperoleh permasalahan seperti proses pengolahan data yang dilakukan secara keseluruhan masih manual yaitu dengan pencatatan pada buku maupun media cetak melalui media *office*, hal tersebut berdampak pada proses pengolahan data yang lambat, kerusakan data akibat data arsip berupa media kertas hingga kehilangan dan manipulasi data. Permasalahan berikutnya yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat berupa kegiatan maupun pengumuman masih dilakukan menggunakan papan pengumuman ataupun menggunakan pamflet, sehingga dampak yang timbul yaitu tingginya biaya operasional dan cakupan informasi yang terbatas. Permasalahan yang juga diangkat pada penelitian oleh (Subekti and Damayanti, 2019) yaitu belum optimalnya penerapan *smart village* di daerah pedesaan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka solusi yang dapat diberikan yaitu dengan membangun aplikasi *smart village* menggunakan *mobile*. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2019 menunjukkan kenaikan angka pengguna internet khususnya pada perangkat *mobile* sebesar 10%, sehingga hal tersebut dapat dijadikan peluang dalam pemanfaatan teknologi internet dibidang pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti memberikan solusi berupa aplikasi berbasis *web* dengan beberapa fitur seperti pengolahan data kependudukan seperti permohonan surat, pengaduan dan pengolahan data informasi dan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat topik dengan judul “**Aplikasi Smart Village Dalam Penerapan Government to Citizen Berbasis Mobile Pada Kelurahan Candimas Natar**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana membangun aplikasi *smart village* untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan yang dirancang yaitu :

1. Menghasilkan aplikasi *smart village* untuk meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis *mobile*.
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi *smartpone* untuk memperoleh informasi pada kelurahan.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah pada aplikasi yang dikembangkan sebagai berikut :

1. Pengolahan data *smart village* seperti data penduduk, layanan pengaduan dan pengolahan informasi.
2. Proses rekap data dapat dilakukan secara priode minggu, bulan dan tahun.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu membantu memudahkan Aparatur dalam mengelola data Penduduk, data Surat dan penyampaian informasi yang lebih akurat dan cepat serta dapat mengembangkan kelurahan dalam segi pelayanan. Membantu Masyarakat dalam melakukan permohonan sehingga tidak harus datang ke kantor kelurahan.